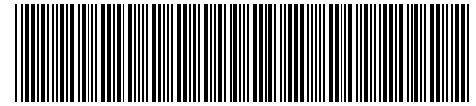




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.08.1.626181/2024**



DS:1905-0058-0130-2720

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
  3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
  4. Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Sebesar : Rp. 51.761.434.000 ( LIMA PULUH SATU MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	51.761.434.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 51.761.434.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024**



DS:1905-0058-0130-2720

Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	21.300.248.000
BB.1598	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	1.746.954.000
BB.1600	Litigasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	2.370.135.000
BB.1601	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	8.933.500.000
BB.1602	Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	1.772.091.000
BB.5851	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra	Rp.	4.177.568.000
BB.5852	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian	Rp.	2.300.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	30.461.186.000
WA.6233	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP	Rp.	30.461.186.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



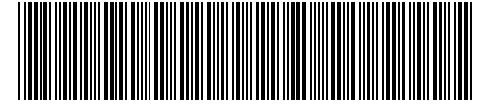
DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			21.300.248.000
Kegiatan	:	1598	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan			1.746.954.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapat pembinaan Pola Karir Perancang Peraturan Perundang-Undangan			
		2. 01	Persentase fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada kanwil Kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1598.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	200,00	Orang	510.888.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Standarisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan	200,00	Orang	510.888.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1598.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	362.590.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	Kebijakan Teknis Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah	2,00	NSPK	224.855.000
		02 AFA.002	Kebijakan Teknis Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	3,00	NSPK	137.735.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1598.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	18,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	873.476.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Substansi Perancangan Perda	10,00	Lembaga	208.900.000
		02 BDB.002	Pendampingan/Supervisi Fasilitasi Perancangan Perda	4,00	Lembaga	227.838.000
		03 BDB.003	Pembinaan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan	4,00	Lembaga	436.738.000
Kegiatan	:	1600	Litigasi Peraturan Perundang-Undangan			2.370.135.000
	:	1. 01	Persentase penyelesaian Keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung			
		2. 01	Persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi			
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1600.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	66,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.370.135.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Litigasi PUU di MK dan MA Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Keamanan	22,00	Rekomendasi Kebijakan	805.795.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman : I A. 2

Kebijakan Bidang Hukum dan HAM

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

02	ABD.002	Rekomendasi Litigasi PUU di MK dan MA Bidang Kesejahteraan Rakyat	20.00	Rekomendasi Kebijakan	647.052.000
03	ABD.003	Rekomendasi Litigasi PUU di MK dan MA Bidang Perekonomian	18.00	Rekomendasi Kebijakan	533.990.000
04	ABD.004	Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan di Luar Pengadilan Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Keamanan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	225.026.000
05	ABD.005	Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan di Luar Pengadilan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.00	Rekomendasi Kebijakan	49.030.000
06	ABD.006	Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan di Luar Pengadilan Bidang Perekonomian	2.00	Rekomendasi Kebijakan	109.242.000

Kegiatan	: 1601	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan			8.933.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkumham sesuai dengan perencanaan			
Klasifikasi Rincian Output	5	: 1601.AAA Undang-Undang	7,00	UU, RUU	1.548.838.000
Rincian Output	: 01	AAA.001 Penyusunan Rancangan Undang-Undang	3.00	RUU	450.000.000
	: 02	AAA.002 Pembahasan RUU dan Penyusunan DIM	4.00	RUU	1.098.838.000
Klasifikasi Rincian Output	6	: 1601.AAC Peraturan Pemerintah	3,00	PP, RPP	500.000.000
Rincian Output	: 01	AAC.001 Rancangan Peraturan Pemerintah	3.00	RPP	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	: 1601.AAD Peraturan Presiden	5,00	PerPres, R.Perpres	400.000.000
Rincian Output	: 01	AAD.001 Rancangan Peraturan Presiden	5.00	R.Perpres	400.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



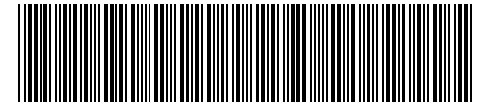
DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	8	:	1601.AAG	Peraturan Menteri		20,00	PerMen, Perka, RPermen	1.196.238.000
Rincian Output		:	01	AAG.001	Rancangan Peraturan Menteri	20,00	RPermen	1.196.238.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	1601.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		6,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	522.500.000
Rincian Output		:	01	ABD.001	Konsepsi RPUU	6,00	Rekomendasi Kebijakan	522.500.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	1601.PAA	Undang-Undang		4,00	UU, RUU	3.795.143.000
Rincian Output		:	01	PAA.002	RUU KUH Acara Perdata (PN)	1,00	RUU	1.793.000.000
		:	02	PAA.003	RUU Kepailitan (PN)	1,00	RUU	501.000.000
		:	03	PAA.004	RUU Jaminan Benda Bergerak (PN)	1,00	RUU	501.000.000
		:	04	PAA.005	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (PN)	1,00	RUU	1.000.143.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	1601.PAC	Peraturan Pemerintah		4,00	PP, RPP	970.781.000
Rincian Output		:	01	PAC.001	RPP Pelaksanaan UU KUHP (PN)	4,00	RPP	970.781.000
Kegiatan		:	1602	Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan				1.772.091.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai dengan pengajuan				
		:	2. 02	Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan pengajuan				
		:	3. 03	Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan terhadap total peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan				
		:	4. 04	Tingkat ketersediaan layanan sistem informasi lingkup Ditjen PP				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	12	:	1602.BMA	Data dan Informasi Publik	4,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.772.091.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Pengundangan PUU	1.00	layanan	339.999.000
		02	BMA.002	Publikasi Jurnal Legislasi Indonesia	1.00	layanan	329.302.000
		03	BMA.003	Data dan Informasi PUU	1.00	layanan	725.569.000
		04	BMA.004	Terjemahan Peraturan Perundang-undangan	1.00	layanan	377.221.000
Kegiatan	:	5851		Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra			4.177.568.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang Politik dan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aparatur negara serta Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan kesejahteraan rakyat yang selesai diharmonisasi sesuai deng			
Klasifikasi Rincian Output	13	:	5851.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	80,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.177.568.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Politik, Pemerintahan, dan Pertahanan	20.00	Rekomendasi Kebijakan	1.044.392.000
		02	ABD.002	Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan	20.00	Rekomendasi Kebijakan	1.044.392.000
		03	ABD.003	Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang SDM, Remunerasi, Kelembagaan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata, dan Perumahan Rakyat	20.00	Rekomendasi Kebijakan	1.044.392.000
		04	ABD.004	Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dan Sosial	20.00	Rekomendasi Kebijakan	1.044.392.000
Kegiatan	:	5852		Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian			2.300.000.000
	:	1. 01		Persentase terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian sesuai dengan kebijakan teknis yang harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
Klasifikasi Rincian Output	14	:	5852.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	80,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.300.000.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Moneter, Jasa Keuangan, BUMN, dan Penanaman Modal	20.00	Rekomendasi Kebijakan	550.000.000
		02	ABD.002	Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Perencanaan	20.00	Rekomendasi Kebijakan	575.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



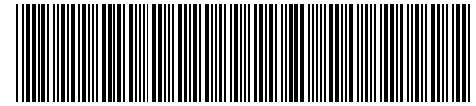
DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman : I A. 5

Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
			Pembangunan Nasional, dan Fiskal	20.00	Rekomendasi Kebijakan	
	03	ABD.003	Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang SDA, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang	20.00	Rekomendasi Kebijakan	575.000.000
	04	ABD.004	Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset, dan Teknologi	20.00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
Program	:	013.08.WA	Program Dukungan Manajemen			30.461.186.000
Kegiatan	:	6233	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP			30.461.186.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6233.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	28.369.450.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	207.202.000
		02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	598.302.000
		03	EBA.959 Layanan Protokoler	1.00	Layanan	3.000.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	94.036.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	50.019.000
		06	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	160.000.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	2.00	Layanan	27.256.891.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6233.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	245,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	310.000.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	245.00	Orang	310.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6233.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.781.736.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Layanan	769.438.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman : I A. 6

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Laporan	303.700.000
03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	366.786.000
04	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Layanan	298.406.000
05	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Layanan	43.406.000

Jakarta, 24 November 2023

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

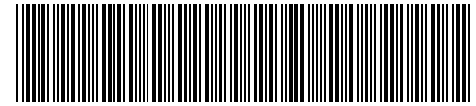


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024

I B. SUMBER DANA



DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	51.761.434.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	51.761.434.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

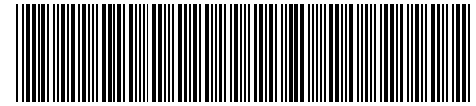
Pagu

Ekuivalen Rupiah

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
626181	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.683.165	34.078.269	-	-	-	51.761.434		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	21.300.248	-	-	-	21.300.248		
1598	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	-	1.746.954	-	-	-	1.746.954		
1598.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	510.888	-	-	-	510.888	01 . 54	
01	RM	-	510.888	-	-	-	510.888	139	
1598.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	362.590	-	-	-	362.590	01 . 54	
01	RM	-	362.590	-	-	-	362.590	139	
1598.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	873.476	-	-	-	873.476	01 . 54	
01	RM	-	873.476	-	-	-	873.476	139	
1600	Litigasi Peraturan Perundang-Undangan	-	2.370.135	-	-	-	2.370.135		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1600.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.370.135	-	-	-	2.370.135	01 . 54	
01	RM	-	2.370.135	-	-	-	2.370.135	139	
<b>1601</b>	<b>Perancangan Peraturan Perundang-Undangan</b>	-	<b>8.933.500</b>	-	-	-	<b>8.933.500</b>		
1601.AAA	Undang-Undang (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.548.838	-	-	-	1.548.838	01 . 54	
01	RM	-	1.548.838	-	-	-	1.548.838	139	
1601.AAC	Peraturan Pemerintah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 54	
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	139	
1601.AAD	Peraturan Presiden (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	400.000	-	-	-	400.000	01 . 54	
01	RM	-	400.000	-	-	-	400.000	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



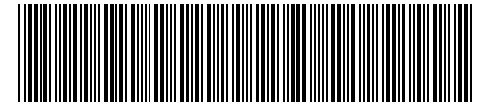
DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1601.AAG	Peraturan Menteri (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.196.238	-	-	-	1.196.238	01 . 54	
01	RM	-	1.196.238	-	-	-	1.196.238	139	
1601.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	522.500	-	-	-	522.500	01 . 54	
01	RM	-	522.500	-	-	-	522.500	139	
1601.PAA	Undang-Undang (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.795.143	-	-	-	3.795.143	01 . 54	
01	RM	-	3.795.143	-	-	-	3.795.143	139	
1601.PAC	Peraturan Pemerintah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	970.781	-	-	-	970.781	01 . 54	
01	RM	-	970.781	-	-	-	970.781	139	
<b>1602</b>	<b>Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	-	<b>1.772.091</b>	-	-	-	<b>1.772.091</b>		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



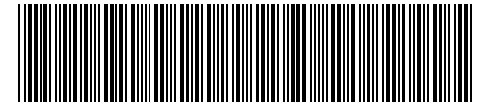
DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1602.BMA	Data dan Informasi Publik (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.772.091	-	-	-	1.772.091	01 . 54	
01	RM	-	1.772.091	-	-	-	1.772.091	139	
<b>5851</b>	<b>Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra</b>	-	<b>4.177.568</b>	-	-	-	<b>4.177.568</b>		
5851.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.177.568	-	-	-	4.177.568	01 . 54	
01	RM	-	4.177.568	-	-	-	4.177.568	139	
<b>5852</b>	<b>Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian</b>	-	<b>2.300.000</b>	-	-	-	<b>2.300.000</b>		
5852.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	01 . 54	
01	RM	-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	139	
<b>013.08.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>17.683.165</b>	<b>12.778.021</b>	-	-	-	<b>30.461.186</b>		
<b>6233</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP</b>	<b>17.683.165</b>	<b>12.778.021</b>	-	-	-	<b>30.461.186</b>		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Kewenangan : (KP)

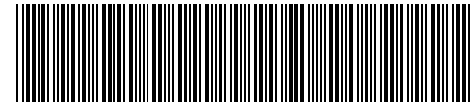
Halaman : II. 5  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6233.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	17.683.165	10.686.285	-	-	-	28.369.450	01 . 54	
01	RM	17.683.165	10.686.285	-	-	-	28.369.450	139	
6233.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	310.000	-	-	-	310.000	01 . 54	
01	RM	-	310.000	-	-	-	310.000	139	
6233.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.781.736	-	-	-	1.781.736	01 . 54	
01	RM	-	1.781.736	-	-	-	1.781.736	139	
<b>JUMLAH</b>		<b>17.683.165</b>	<b>34.078.269</b>	-	-	-	<b>51.761.434</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	626181	<b>DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	2.854.667	2.754.959	3.654.061	4.280.480	4.423.435	6.901.694	3.288.898	3.495.964	4.382.294	4.330.413	4.622.772	6.771.796	51.761.434
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.020.904	1.199.380	1.240.636	2.360.732	1.241.161	2.380.261	1.266.452	1.251.986	1.251.986	1.247.816	1.247.816	1.974.035	17.683.165
		<b>BELANJA BARANG</b>	1.833.763	1.555.579	2.413.425	1.919.748	3.182.274	4.521.434	2.022.446	2.243.978	3.130.309	3.082.596	3.374.956	4.797.761	34.078.269
	013.08.BB.1598	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	76.339	160.301	155.360	81.594	141.662	91.808	119.709	52.517	183.984	111.865	258.058	313.758	1.746.954
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	76.339	160.301	155.360	81.594	141.662	91.808	119.709	52.517	183.984	111.865	258.058	313.758	1.746.954
	013.08.BB.1600	Litigasi Peraturan Perundang-Undangan	51.994	80.081	103.627	90.974	146.949	296.221	295.793	293.805	172.837	282.079	361.837	193.938	2.370.135
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	51.994	80.081	103.627	90.974	146.949	296.221	295.793	293.805	172.837	282.079	361.837	193.938	2.370.135
	013.08.BB.1601	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	0	313.757	936.517	494.758	644.724	1.503.108	665.519	629.275	1.455.676	887.680	849.115	553.371	8.933.500
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	313.757	936.517	494.758	644.724	1.503.108	665.519	629.275	1.455.676	887.680	849.115	553.371	8.933.500
	013.08.BB.1602	Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	17.609	114.980	112.243	97.905	135.185	142.524	95.155	92.066	121.833	125.167	183.325	534.099	1.772.091
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	17.609	114.980	112.243	97.905	135.185	142.524	95.155	92.066	121.833	125.167	183.325	534.099	1.772.091
	013.08.BB.5851	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra	7.653	127.218	74.960	92.447	1.269.511	167.166	37.104	157.997	48.109	231.444	119.996	1.843.963	4.177.568
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	7.653	127.218	74.960	92.447	1.269.511	167.166	37.104	157.997	48.109	231.444	119.996	1.843.963	4.177.568

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (626181) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

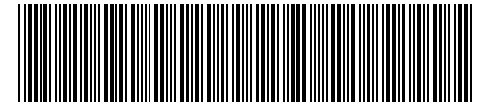
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	013.08.BB.5852	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian	496.640	183.601	144.225	41.168	136.859	323.548	161.864	90.603	179.107	164.713	339.879	37.794	2.300.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	496.640	183.601	144.225	41.168	136.859	323.548	161.864	90.603	179.107	164.713	339.879	37.794	2.300.000
	013.08.WA.6233	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP	2.204.433	1.775.022	2.127.130	3.381.635	1.948.545	4.377.320	1.913.755	2.179.699	2.220.748	2.527.465	2.510.562	3.294.872	30.461.186
		51 BELANJA PEGAWAI	1.020.904	1.199.380	1.240.636	2.360.732	1.241.161	2.380.261	1.266.452	1.251.986	1.251.986	1.247.816	1.247.816	1.974.035	17.683.165
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.183.528	575.643	886.494	1.020.902	707.385	1.997.059	647.302	927.713	968.762	1.279.649	1.262.746	1.320.837	12.778.021
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	0	0	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	11.567	11.568	69.375
		- PNBP (425129)	0	0	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	11.567	11.568	69.375

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [626181] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.1.626181/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:1905-0058-0130-2720

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [626181] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001